**BUPATI BIREUEN**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN**
**NOMOR 23 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BIREUEN**

**BUPATI BIREUEN,**

**Menimbang** :

a. bahwa dengan berlakunya Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola sektor Pendidikan sesuai dengan karakter Daerah masing-masing;

b. bahwa untuk menjamin tercapainya mutu pendidikan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten/Kota dimaksud, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Bireuen dalam suatu Peraturan.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

Scanned by CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non personalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madarash Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

19. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 15);

20. Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor : 065/12111 Tahun 2011 tentang Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BIREUEN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah Unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Organisasi Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan di Kabupaten Bireuen.
9. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar selanjutnya disebut SPM Bidang Pendidikan Dasar adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
11. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
12. Jenis Pelayanan adalah pelayanan publik yang mutlak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalam kehidupan.
13. Urusan Wajib Bidang Pendidikan adalah penyelenggaraan pelayanan pada bidang Pendidikan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar masyarakat yang pelaksanaannya berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten dan dijabarkan menurut jenis pelayanan.
14. Nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur target pencapaian kondisi penyelenggaraan Pendidikan yang diharapkan sampai dengan tahun 2013.
15. Target Pencapaian adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.
17. Standar Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
18. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
19. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
20. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mencapai standar pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

Scanned by CamScanner

21. Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olah raga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
22. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, Kabupaten/Kota, Provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
23. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
24. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
26. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
27. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi dengan tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
28. Pengelolaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di daerah agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
29. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati terdiri dari unsur pemerintah, organisasi profesi Pendidikan dan organisasi non pemerintah yang bertugas melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Bireuen.
30. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (atau nama lain) pada setiap Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen.

## BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

(1) Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada SKPK bidang Pendidikan, Satuan Pendidikan dan Stakeholder lainnya dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Kabupaten Bireuen.

(2) SPM Pendidikan Dasar bertujuan :
   a. Pemerataan kesempatan pendidikan;
   b. Meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar;
   c. Mengembangkan manajemen pendidikan yang bertumpu pada partisipasi masyarakat, transparansi anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan;
   d. Sebagai langkah awal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.

## BAB III

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Standar pelayanan minimal bidang pendidikan dasar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. Perencanaan;
b. Penyelenggaraan pendidikan formal;
c. Kurikulum;
d. Pendidikan keagamaan;

Scanned by CamScanner

e. Peserta didik;
f. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
g. Sarana dan prasarana;
h. Sertifikasi guru;
i. Supervisi;
j. Evaluasi;
k. Pengawasan;
l. Wajib belajar;
m. Partisipasi masyarakat; dan
n. Pendanaan pendidikan yang menjadi batas kewenangan Pemerintah Kabupaten.

## BAB IV

## JENIS PELAYANAN DAN INDIKATOR

### Bagian Kesatu
### Jenis Pelayanan

### Pasal 4

(1) Penyelenggaraan SPM bidang pendidikan dasar merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah Pusat.

(2) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Pelayanan pendidikan dasar oleh Kabupaten :
- Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
- Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis;
- Pada setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
- Pada setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
- Pada setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
- Pada setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
- Pada setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
- Pada setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
- Pada setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;
- Semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
- Semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
- Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
- Pemerintah Kabupaten memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;
- Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

Scanned by CamScanner

b. Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan :
   - Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
   - Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik;
   - Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (*globe*), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
   - Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
   - Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
   - Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :
     Kelas I - II : 18 jam per minggu;
     Kelas III : 24 jam per minggu;
     Kelas IV - VI : 27 jam per minggu;
     Kelas VII - IX : 27 jam per minggu.
   - Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
   - Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
   - Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
   - Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
   - Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten pada setiap akhir semester;
   - Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

**Bagian Kedua**
**Indikator**

**Pasal 5**

1) Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan Dasar pada jenjang (SD/MI) terdiri atas:
   a. 100 persen anak dalam kelompok usia 7-12 tahun memperoleh pendidikan dasar;
   b. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah;
   c. 100 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional;
   d. 100 persen dari jumlah guru SD yang diperlukan terpenuhi;
   e. 100 persen guru SD/MI memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
   f. 100 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran;
   g. Jumlah siswa SD/MI per kelas tidak melebihi 32 peserta didik;
   h. 100 persen dari siswa kelas VI mampu membaca Al-Qur`an;
   i. 90 persen dari siswa yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai "memuaskan" dalam mata pelajaran membaca, menulis dan berhitung untuk kelas III dan mata pelajaran bahasa, matematika, IPA dan IPS untuk kelas V; dan
   j. 100 persen dari lulusan SD/MI melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Scanned by CamScanner

2) Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan Dasar pada jenjang (SMP/MTs) terdiri atas :
   a. 100 persen anak dalam kelompok usia 13 - 15 tahun bersekolah di SMP/MTs;
   b. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah;
   c. 100 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang di-tetapkan secara nasional.
   d. 100 persen dari jumlah guru SMP yang diperlukan terpenuhi;
   e. 70 persen guru SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 35 persen diantaranya memiliki sertifikat pendidik;
   f. 100 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran;
   g. 100 persen dari siswa kelas IX mampu membaca Al-Qur`an dengan benar;
   h. Jumlah siswa SMP/MTs per kelas tidak melebihi 36 peserta didik;
   i. 90 persen dari siswa yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai "memuaskan" dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS di kelas I dan II; dan
   j. 70 persen dari lulusan SMP/MTs melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

**Pasal 6**

SPM akan dicapai pada setiap tahun anggaran dengan menuju pada angka 100% pada tahun 2013

**BAB V**

**PELAKSANAAN DAN PENERAPAN**

**Bagian Kesatu**
**Pelaksanaan**

**Pasal 7**

(1) SKPK Pendidikan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan SPM yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini.

(2) Kepala SKPK Pendidikan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan sebagaimana indikator yang telah ditetapkan.

**Bagian Kedua**
**Penerapan**

**Pasal 8**

(1) SKPK pendidikan mengusulkan rencana anggaran untuk pencapaian SPM Pendidikan Dasar dan upaya peningkatan mutu pendidikan kepada Bupati setiap tahunnya untuk memperkecil kesenjangan.

(2) Setiap Unit Kerja Pendidikan menyusun rencana aksi untuk pencapaian target SPM Tahunan.

(3) Dalam pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara layanan mengacu kepada SPM Pendidikan Dasar.

Scanned by CamScanner

## BAB VI

## KOORDINASI DAN KERJASAMA

### Pasal 9

Koordinasi dan kerjasama dalam pencapaian SPM Pendidikan Dasar dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Dalam pencapaian SPM Pendidikan Dasar, SKPK, UPTD dan satuan pendidikan dapat bekerjasama dengan mitra non Pemerintah;

2. Tim anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBK maupun perencanaan pembangunan Kabupaten khususnya pembangunan bidang Pendidikan pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM Pendidikan Dasar untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan.

## BAB VII

## EVALUASI

### Pasal 10

(1) Bupati membentuk Tim Evaluasi SPM Pendidikan Dasar sesuai usulan dari SKPK Pendidikan.

(2) Tim Evaluasi SPM Pendidikan Dasar bekerja berdasarkan Keputusan Bupati yang bertugas antara lain melakukan monitoring dan evaluasi tentang pencapaian target SPM.

(3) Waktu pelaksanaan evaluasi SPM Pendidikan Dasar dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

## BAB VII

## PENDANAAN

### Pasal 11

Dalam rangka pencapaian target SPM Pendidikan Dasar, Pemerintah Kabupaten Bireuen menjamin tersedianya anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB IX

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu
### Pembinaan

### Pasal 12

Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Keistimewaan Aceh melakukan pembinaan dalam rangka pencapaian SPM Pendidikan Dasar.

### Bagian Kedua
### Pengawasan

### Pasal 13

Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Tim evaluasi SPM Pendidikan Dasar secara berkala pada masing-masing Satuan Pendidikan.

Scanned by CamScanner

## BAB X

## PELAPORAN

### Pasal 14

(1) Laporan pencapaian SPM Pendidikan Dasar disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPK Pendidikan oleh pimpinan masing-masing satuan pendidikan minimal 1(satu) kali dalam setahun.

(2) Laporan pencapaian SPM Pendidikan Dasar Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format yang tercantum dalam **Lampiran** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

**Ditetapkan di Bireuen**
**pada tanggal** 8 Desember 2011

**BUPATI BIREUEN,**

**NURDIN ABDUL RAHMAN**

**Diundangkan di Bireuen**
**pada tanggal** 8 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Ir. RAZUARDI, MT**
**Pembina Utama Muda**
**Nip. 19611209 199003 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2011 NOMOR** 115

Scanned by CamScanner

Lampiran : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : 23 Tahun 2011
Tanggal : 8 Desember 2011

**FORMAT LAPORAN PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR**

| | |
|---|---|
| Nama Sekolah | : ..... |
| Nomor NPSN/NSS | : ..... |
| Status Sekolah | ☐ Negeri ☐ Swasta |
| Alamat Sekolah | : ..... |
| Desa | : ..... |
| Kecamatan | : ..... |
| Kab/Kota | : ..... |

| | |
|---|---|
| Nama Kepala Sekolah | ..... |
| Telp. / HP Kepala Sekolah | ..... |
| Tanda Tangan Kepala Sekolah & Stempel Sekolah | |

**A. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA**

**I. DATA SISWA SD/MI**

| No. | Tingkatan | | Rombel A | | | Rombel B | | | Rombel C | | | Rombel D | | | Rombel E | | | Rombel F | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total |
| 1. | Kelas | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Kelas | II | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Kelas | III | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Kelas | IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Kelas | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Kelas | VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**DATA SISWA SMP/MTs**

| No. | Tingkatan | | Rombel A | | | Rombel B | | | Rombel C | | | Rombel D | | | Rombel E | | | Rombel F | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total |
| 1. | Kelas | VII | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Kelas | VIII | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Kelas | IX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**II. FASILITAS RUANG BELAJAR**

*1. Jumlah Ruang Kelas*

| | |
|---|---|
| - Baik | |
| - Rusak Ringan | |
| - Tidak Layak Pakai | |
| **Total** | |

Scanned by CamScanner

2. *Ketersediaan Meja, Kursi & Papan Tulis (SD/MI)*

| No. | Tingkatan | | Rombel A | | | Rombel B | | | Rombel C | | | Rombel D | | | Rombel E | | | Rombel F | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meja | Kursi | Papan Tulis | Meja | Kursi | Papan Tulis | Meja | Kursi | Papan Tulis | Meja | Kursi | Papan Tulis | Meja | Kursi | Papan Tulis | Meja | Kursi | Papan Tulis |
| 1. | Kelas | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Kelas | II | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Kelas | III | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Kelas | IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Kelas | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Kelas | VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3. *Ketersediaan Meja, Kursi & Papan Tulis (SMP/MTs)*

| No. | Tingkatan | | Rombel A | | | Rombel B | | | Rombel C | | | Rombel D | | | Rombel E | | | Rombel F | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meja | Kursi | Papan Tulis | Meja | Kursi | Papan Tulis | Meja | Kursi | Papan Tulis | Meja | Kursi | Papan Tulis | Meja | Kursi | Papan Tulis | Meja | Kursi | Papan Tulis |
| 1. | Kelas | VII | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Kelas | VIII | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Kelas | IX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## III. FASILITAS RUANG LABORATORIUM IPA

4. *Ketersediaan Ruang Laboratorium IPA lengkap Meja & Kursi untuk 36 Peserta Didik (SMP/MTs)*

- Laboratorium IPA [ ] Ya [ ] Tidak
- Jumlah Meja [ ] Unit
- Jumlah Kursi [ ] Unit
- Kapasitas Meja [ ] Siswa
- Kapasitas Kursi [ ] Siswa

5. *Ketersiaan satu Set Perulatan Praktek IPA (SMP/MTs)*

- Mistar 6 buah [ ] buah
- Jangka Sorong 6 buah [ ] buah
- Timbangan 6 buah [ ] buah
- Stopwatch 6 buah [ ] buah
- Rol meter 1 buah [ ] buah
- Percobaan optik 1 set [ ] Set
- Gelas Kimia 30 buah [ ] buah
- kaki tiga 6 buah [ ] buah
- Plat tetes 6 buah [ ] buah
- Termometer 100° C 6 buah [ ] buah
- Gelas ukur 6 buah [ ] buah
- Massalogam 3 buah [ ] buah
- Magnet Batang 6 buah [ ] buah
- Pembakar Spiritus 6 buah [ ] buah
- Cawan Penguapan 6 buah [ ] buah
- Pipet Tetes + karet 100 buah [ ] buah
- Poster genetika 1 buah [ ] buah
- Globe 1 buah [ ] buah
- Model Tata Surya 1 buah [ ] buah
- Garpu Tala 6 buah [ ] buah
- Bidang Miring 1 buah [ ] buah
- Dinamometer 6 buah [ ] buah
- Katrol tetap 2 buah [ ] buah
- Katrol bergerak 2 buah [ ] buah
- Balok kayu 3 macam [ ] buah
- Kaca Pembesar 6 buah [ ] buah
- Percobaan muai panjang 1 set [ ] Set

Scanned by CamScanner

- Model tubuh manusia 1 buah ☐ buah
- Model kerangka manusia 1 buah ☐ buah
- Gambar/model pencernaan manusia 1 buah ☐ buah
- Gambar/model peredaran darah manusia 1 buah ☐ buah
- Gambar/model sistem pernafasan manusia 1 buah ☐ buah
- Gambar/model jantung manusia 1 buah ☐ buah
- Gambar/model mata manusia 1 buah ☐ buah

## IV. FASILITAS RUANG GURU & KEPALA SEKOLAH

### 6. *Ketersediaan Ruang Guru & Fasilitas meja + kursi (SD/MI)*

- Ruang Guru ☐ Ya ☐ Tidak
- Meja Tenaga Pendidik ☐ Unit
- Kursi Tenaga Pendidik ☐ Unit
- Meja Tenaga Kependidikan ☐ Unit
- Kursi Tenaga Kependidikan ☐ Unit

### 7. *Ketersediaan Ruang Kepala Sekolah (SMP/MTs)*

- Ruang Kepala Sekolah ☐ Ya
- Meja Kerja Kepala Sekolah ☐ Unit
- Kursi Kerja Kepala Sekolah ☐ Unit
- Kursi Tamu Minimal 2 Unit ☐ Unit

### 8. *Ketersediaan Ruang Guru & Fasilitas meja + kursi (SMP/MTs)*

- Ruang Guru ☐ Ya ☐ Tidak
- Meja Tenaga Pendidik ☐ Unit
- Kursi Tenaga Pendidik ☐ Unit
- Meja Tenaga Kependidikan ☐ Unit
- Kursi Tenaga Kependidikan ☐ Unit

- Gambar/model telinga manusia 1 buah ☐ buah
- Gambar/model tenggorokan manusia 1 buah ☐ buah
- Petunjuk percobaan 6 buah ☐ buah
- Percobaan rangkaian listrik 1 set ☐ Set
- Model Molukel Sederhana 6 set ☐ Set
- Multimeter AC/DC, 10 kilo ohm/volt 6 buah ☐ buah
- Mikroskop monokuler 6 buah ☐ buah

### 10. *Ketersediaan Guru Untuk Setiap Matapelajaran (SMP/MTs)*

- Mapel Matematika ☐ Orang
- Mapel IPA ☐ Orang
- Mapel Bahasa Indonesia ☐ Orang
- Mapel Bahasa Inggris ☐ Orang
- Mapel IPS ☐ Orang
- Mapel Fisika ☐ Orang
- Mapel Kimia ☐ Orang
- Mapel Biologi ☐ Orang
- Mapel Ekonomi ☐ Orang
- Mapel geografi ☐ Orang
- Mapel Sosiaologi ☐ Orang
- Mapel Bahasa Asing ☐ Orang
- Mapel Agama ☐ Orang
- Mapel Kesenian ☐ Orang
- Mapel Penjaskes ☐ Orang
- Mapel KTK ☐ Orang
- Mapel TIK ☐ Orang
- Mapel Ekonomi ☐ Orang
- Mapel PPKN ☐ Orang

Scanned by CamScanner

## V. KETERSEDIAAN SUMBER DAYA TENAGA PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN

***9. Ketersediaan Guru Keseluruhan dan Tenaga Kependidikan (SD/MI)***

| No | Status | Tingkat Pendidikan | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SMA/Sederajat | D-2 | D-3 | S 1 /D - IV | S 2 | |
| 1. | Kepala Sekolah | | | | | | |
| 2. | Jumlah Guru Tetap | | | | | | |
| 3. | Jumlah Guru Honor | | | | | | |
| 4. | Jumlah Guru Bakti | | | | | | |
| 5. | Jumlah Tenaga Adm | | | | | | |
| 6. | Jumlah Penjaga Sekolah | | | | | | |

***11. Ketersediaan Guru Keseluruhan dan Tenaga Kependidikan (SMP/MTs)***

| No | Status | Tingkat Pendidikan | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SMA/Sederajat | D-2 | D-3 | S 1 /D - IV | S 2 | |
| 1. | Kepala Sekolah | | | | | | |
| 2. | Jumlah Guru Tetap | | | | | | |
| 3. | Jumlah Guru Honor | | | | | | |
| 4. | Jumlah Guru Bakti | | | | | | |
| 5. | Jumlah Tenaga Adm | | | | | | |
| 6. | Jumlah Penjaga Sekolah | | | | | | |

***12. Ketersediaan Guru di satuan Pendidikan (SD/MI)***

- Guru Kelas ☐ Orang
- Guru Agama ☐ Orang
- Guru Penjas ☐ Orang

***13. Ketersediaan Guru yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik (SD/MI)***

- Jumlah Guru dengan kualifikasi Akademik S1/D-IV dan memiliki Sertifikat Pendidikan ☐ Orang

***14. Ketersediaan Guru yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik (SMP/MTs)***

- Jumlah Guru dengan kualifikasi Akademik S1/D-IV dan memiliki Sertifikat Pendidikan ☐ Orang
- Jumlah Guru Mapel. Dengan Kualifikasi Akademik S1/D-IV dan Memiliki Sertifikat Pendidikan
  - Mapel Matematika ☐ Orang
  - Mapel IPA ☐ Orang
  - Mapel Bahasa Indonesia ☐ Orang
  - Mapel Bahasa Inggris ☐ Orang

***15. Ketersediaan Kepala Sekolah (SD/MI & SMP/MTs)***

| | | |
|---|---|---|
| - Kepala Sekolah Telah Selesai Pendidikan S1/D-IV | ☐ Ya ☐ Tidak | ☐ Ya ☐ Tidak |
| - Kepala Sekolah Telah memiliki Sertifikat Pendidikan | | |

Scanned by CamScanner

16. ***Ketersediaan Pengawas (di isi oleh dinas)***

- Jumlah Pengawas Keseluruhan ____ Orang
- Jumlah Pengawas yang telah Selesai Pendidikan S1/D-IV ____ Orang
- Jumlah Pengawas yang telah Memiliki Sertifikat Pendidik ____ Orang

17. ***Rencana Kab/Kota dalam Penyelenggaraan Pendidikan***

- Bila kabupaten/kota memiliki rencana dan telah melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; ____ Ya ____ Tidak
- Bila memiliki rencana tetapi belum melaksanakan ____ Ya ____ Tidak
- Bila tidak memiliki rencana untuk membantu sekolah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif ____ Ya ____ Tidak

18. ***Jumlah Kunjungan Pengawas***

- Berapa kali pengawas melakukan kunjungan pada Semister lalu untuk melakukan Supervisi dan Pembinaan ____ kali
- Berapa Jam pengawas berada di Satuan Pendidikan setiap melakukan kunjungan pada Semister lalu ____ jam

**B. KEWENANGAN SATUAN PENDIDIKAN**

19. ***Jumlah Buku Teks Tersertifikasi (SD/MI)***

| No | Jenis Buku Teks | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Kelas IV | Kelas V | Kelas VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bahasa Indonesia | | | | | | |
| 2. | Matematika | | | | | | |
| 3. | IPA | | | | | | |
| 4. | IPS | | | | | | |
| | **Total** | | | | | | |

20. ***Jumlah Buku Teks Tersertifikasi (SMP/MTs)***

| No | Jenis Buku Teks | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Matematika | | | |
| 2. | IPA | | | |
| 3. | Bahasa Indonesia | | | |
| 4. | Bahasa Inggris | | | |
| 5. | IPS | | | |
| 6. | Fisika | | | |
| 7. | Kimia | | | |
| 8. | Biologi | | | |
| 9. | Ekonomi | | | |
| 10. | Geografi | | | |
| 11. | Sosiaologi | | | |
| 12. | Bahasa Asing | | | |
| 13. | Agama | | | |
| 14. | Kesenian | | | |

21. ***Jumlah Set Alat Peraga IPA Untuk Eksperimen Dasar (SD/MI)***

| No | Jenis | Ketersediaan | |
|---|---|---|---|
| | | Jumlah Total | Kondisi Baik/Layak Pakai |
| 1. | Kerangka Manusia 1 buah | | |
| 2. | Model Tubuh Manusia 1 Buah | | |
| 3. | Bola Dunia (Globe) 1 buah | | |
| 4. | Kaca Pembesar 6 buah | | |
| 5. | Cermin Datar 6 buah | | |
| 6. | Cermin Cekung 6 buah | | |
| 7. | Cermin Cembung 6 buah | | |
| 8. | Lensa Datar 6 buah | | |
| 9. | Lensa Cekung 6 buah | | |
| 10. | Lensa Cembung 6 buah | | |
| 11. | Magnet Batang 6 buah | | |
| 12. | Poster IPA 1 set | | |

Scanned by CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15. | Penjaskes | | | |
| 16. | KTK | | | |
| 17. | TIK | | | |
| 18. | Ekonomi | | | |
| 19. | PPKN | | | |
| | Total | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13. | KIT Matematika 1 set | | |
| 14. | Model Tata Surya 1 set | | |

***22. Ketersediaan Jumlah Judul Buku Pengayaan dan Buku Referensi (SMP/MTs)***

- Jumlah Judul Buku Pengayaan ____ Set
- Jumlah Judul Buku Refensi ____ Set

***23. Ketersediaan Jumlah Judul Buku Pengayaan dan Buku Referensi (SD/MI)***

- Jumlah Judul Buku Pengayaan ____ Set
- Jumlah Judul Buku Refensi ____ Set

***24. Jumlah Jam Kerja Guru Tetap/37.5 Jam Per Minggu (SD/MI & SMP/MTs)***

| No | Jenis Kegiatan | Jam Kerja Guru A | Jam Kerja Guru B | Jam Kerja Guru C | Jam Kerja Guru D | Jam Kerja Guru E | Jam Kerja Guru F | Dst.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kegiatan Tatap Muka | | | | | | | |
| 2. | Merencanakan Pembelajaran | | | | | | | |
| 3. | Menilai hasil Pembelajaran | | | | | | | |
| 4. | Membimbing dan Melatih Siswa | | | | | | | |
| 5. | Tugas Tambahan | | | | | | | |
| | Total | | | | | | | |

25. Jumlah Minggu Belajar 34 minggu per tahun (SD/MI ) ____ Minggu
26. Jumlah Minggu Belajar 34 minggu per tahun (SMP/MTs) ____ Minggu

***27. Jumlah Satuan Pendidikan Menerapkan KTSP***

____ Ya
____ Tidak

***28. Jumlah Satuan Pendidikan Menerapkan Managemen Berbasis Sekolah (MBS)***

____ Ya
____ Tidak

***29. Jumlah Guru yang menyusun dan Menerapkan RPP, Program penilaian dan menyampaikan hasil evaluasi serta penilaian***

| No | Jenis Kegiatan | Guru A | Guru B | Guru C | Guru D | Guru E | Guru F | Dst.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Menyusun dan Menerapkan RPP | | | | | | | |
| 2. | Mengembangkan dan menerapkan Program Penilaian | | | | | | | |
| 3. | Membuat dan menyampaikan hasil evaluasi peserta didik kepada kepala Sekolah | | | | | | | |

Scanned by CamScanner

30. *Jumlah Kepala Sekolah Melakukan Supervisi kelas dan Memberi umpan Balik Kepada Guru dua kali setiap Semister*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - Dilakukan | | Ya | | Tidak |
| - Jumlah yang dilakukan pada semister lalu | | kali | | |

31. *Jumlah Satuan Pendidikan yang menyampaikan hasil penilaian peserta didik kepada orang tua siswa dan rekapitulasi kepada Dinas Pendidikan dan kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - Hasil Ulangan Akhir Semister (UAS) | | Ya | | Tidak |
| - Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) | | Ya | | Tidak |
| - Ujian Akhir (US/UN) | | Ya | | Tidak |

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 8 Desember 2011

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
Pada tanggal 8 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. RAZUARDI, MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19611209 199003 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2011 NOMOR 115

Scanned by CamScanner